

MEMBANGUN *CIVIC ENGAGEMENT* MELALUI MODEL *SERVICE LEARNING* UNTUK MEMPERKUAT KARAKTER WARGA NEGARA

Eli Karliani

Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Palangkaraya
Jl. Yos Sudarso Tanjung Nyahoo Palangka Raya
email:karlias2@yahoo.com

Abstract: Rapid social changes as the result of knowledge and technology progress have been shifted good values to the new ones which are scraping the good values. Citizenship education should be the education of a thinking process. It also should be the education of values, characters, and attitudes. It is due to the fact that education of values, characters, and attitudes does support the building of a nation's characters. In achieving the goal of education of values, characters, and attitudes, habituation efforts are needed. It can be done through internalization and application of civic knowledge, civic values, and civic skills. Students not only have to learn from classes, but also apply those three competence in problem solving in their real lives. Those three competence will be achieved if every individuals have civic engagement in their community life. Service learning method is considered as a good way to internalize values and applying the competence of the students. Furthermore, this method will help students in giving meaning to their mastery in the learning process.

Abstrak: Perubahan sosial yang begitu cepat akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah nilai-nilai yang baik dalam tatanan masyarakat dengan nilai-nilai baru yang mengikis nilai-nilai yang baik tersebut. Pendidikan kewarganegaraan seyogyanya bukan hanya sebagai proses pendidikan berpikir tetapi juga pendidikan nilai dan watak serta perilaku karena pendidikan nilai, watak serta perilaku sangat menunjang dalam membentuk karakter bangsa. Dalam mencapai tujuan pendidikan watak dan perilaku tersebut diperlukan upaya pembiasaan melalui internalisasi dan aplikasi dari civic knowledge, *civic values* maupun civic skill. Siswa dituntut untuk belajar tidak hanya dikelas tetapi dituntut untuk bisa menerapkan ketiga kompetensi yang diperolehnya melalui pengalaman nyata yang ia praktekkan dalam memecahkan berbagai permasalahan yang ada di lingkungannya. Ketiga kompetensi tersebut akan sinergis dapat dicapai apabila setiap individu sebagai warga negara sudah memiliki *civic engagement* yang tercermin dalam kehidupan komunitasnya. Salah satu upaya untuk menginternalisasi nilai dan menerapkan kompetensi yang dimiliki siswa, model service learning dianggap sebagai model yang akan membantu siswa dalam memberi makna terhadap penguasaan kompetensi yang dimiliki siswa dalam proses belajarnya

Kata Kunci : *Service Learning, Civic Engagement, Karakter Warga Negara*

Tulisan ini disusun sebagai bentuk refleksi penulis terhadap output pendidikan yang seharusnya dapat membuat pribadi individu menjadi lebih baik dan memiliki karakter yang baik, pada kenyataannya justru merubah nilai-nilai yang baik yang seharusnya menjadi tujuan pendidikan justru banyak ditinggalkan. Perubahan sosial yang begitu cepat akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah nilai-nilai yang baik dalam tatanan masyarakat dengan nilai-nilai baru yang

mengikis nilai-nilai yang baik tersebut. Hal ini dapat dilihat pada berbagai contoh karakter generasi muda jaman sekarang seperti kurang peduli (*respect*) terhadap sesama, kurang mencintai sesama, tidak memiliki sikap empati kepada sesama, dan lebih cenderung egois dan individualis. Banyak kasus tawuran antar pelajar, kekerasan dalam sekolah yang dilakukan oleh senior, kekerasan yang dilakukan anak-anak kepada orang tua, dan kurangnya kepedulian pada permasalahan yang ada di lingkungannya.

Berdasarkan pengalaman penulis ketika berkunjung ke salah satu tempat, penulis mempunyai simpati ketika seorang pejabat dan sekaligus seorang dosen yang ada di salah satu universitas yang memiliki kerendahan hati untuk membukakan pintu bagi mahasiswanya yang datang bersamaan dengan dirinya, tetapi beliau lah yang membukakan pintu terlebih dahulu dan tetap membuka pintu sebelum mahasiswanya melewati pintu tersebut. Pemandangan tersebut sangat berbeda dengan realitas sosial di Indonesia, penulis melihat bahwa memberi pelayanan bagi orang lain seolah-olah hanya dimiliki oleh masyarakat dengan posisi sebagai bawahan. Stratifikasi itu terlihat apabila ada rombongan pejabat yang datang ke suatu daerah, pelayanan yang kadangkala di luar batas kewajaran selalu diberikan oleh bawahan kepada pejabat. Padahal seharusnya karakter untuk memiliki kepedulian dengan adanya keinginan untuk bisa memberikan pelayanan yang baik kepada semua orang adalah menjadi tanggung jawab semua orang, dan akan menjadi dasar bagi terbentuknya budaya birokrasi yang tulus, pengabdian yang tanpa pamrih, atupun hormat kepada sesama dengan tidak membedakan status sosialnya.

Pendidikan adalah salah satu media untuk menanamkan nilai dan merubah nilai yang ada di dalam masyarakat (*change of value*). Sebagai wahana perubahan nilai melalui program pendidikan formal, nonformal dan informal, pendidikan memerlukan perangkat pengalaman belajar (*learning experiences*), seperti kurikulum/program belajar dan pembelajaran yang secara programatik dapat memandu terjadinya proses pengembangan cita-cita, nilai, konsep dan prinsip belajar memberi pelayanan. Untuk itu diperlukan upaya sistematis dan sistemik untuk merancang kurikulum dan pembelajaran yang secara konseptual menjadi wahana pendidikan dalam konteks pembangunan masyarakat yang berkarakter. Oleh karena itu diperlukan proses rekonseptualisasi pendidikan kewarganegaraan dalam konteks pendidikan yang berkarakter di Indonesia.

Asumsi tentang pendidikan sebagai sarana dan instrumen untuk mengalihkan atau mentransfer ilmu pengetahuan bukan hanya telah mereduksi makna hakiki dan fungsi pendidikan, tetapi juga telah membuat siswa kehilangan daya kritisnya. Pendidikan sejatinya adalah untuk membangun dan mengembangkan potensi manusia agar memiliki

karakter, integritas, dan kompetensi yang bermakna dalam kehidupan. Namun yang terjadi selama ini pendidikan masih terjebak pada pandangan dan praktek yang tidak membangun ruang pembelajaran yang bisa memperkaya nilai-nilai kemanusiaan, keluhuran, kejujuran, dan keadaban. Dengan demikian, sistem dan praktek pendidikan di negeri kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa kurang mendapatkan hasil yang optimal dalam membangun karakter bangsa dan kemuliaan hidup.

Pendidikan harus mempunyai daya dan tata kelola untuk memperkaya kehidupan yang lebih beradab. Pengembangan nilai-nilai kepedulian terhadap sesama di sekolah juga perlu diterapkan untuk menghadapi era globalisasi yang kini diyakini akan menghadirkan banyak perubahan global seiring dengan akselerasi keluar masuknya berbagai kultur dan peradaban baru dari berbagai bangsa di dunia. Itu artinya, dunia pendidikan dalam mencetak sumberdaya manusia yang bermutu dan profesional harus menyiapkan generasi yang peduli, sehingga memiliki daya tahan (*resistence*) yang kokoh di tengah-tengah konflik peradaban.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai satu mata pelajaran di sekolah saat ini harus lebih menekankan kepada pembentukan karakter, dimana substansi pembelajarannya mulai mengarah pada bagaimana menjadikan warga negara yang mampu berpartisipasi secara efektif, cerdas, demokratis dan bertanggung jawab. Pendidikan Kewarganegaraan diarahkan untuk mencapai dua sasaran pokok yang seimbang. *Pertama* meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik tentang etika, moral, dan asas-asas dalam hidup berbangsa dan bernegara. *Kedua*, membentuk sikap, perilaku, dan kepribadian sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Kedua sasaran ini hendaknya dapat dicapai secara holistik agar peserta didik tidak hanya sekedar memahami konsep dan prinsip keilmuan belaka, tetapi juga agar peserta didik memiliki kemampuan berbuat sesuatu dengan menggunakan konsep dan prinsip keilmuan yang telah dikuasainya dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan Kewarganegaraan selayaknya dapat membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan intelektual yang memadai, yang memungkinkan untuk berpartisipasi secara cerdas dan bertanggungjawab dalam berbagai dimensi

kehidupan sehingga dapat membentuk sikap peduli (*respect*). Dengan pendidikan kewarganegaraan diharapkan dapat membentuk budaya kewarganegaraan yang lebih peduli (*respect*). Salah satu unsur dari budaya kewarganegaraan adalah “*civic virtue*” atau kebajikan atau akhlak kewarganegaraan yang mencakup keterlibatan aktif warganegara, hubungan kesejajaran/egaliter, saling percaya dan toleran, kehidupan yang kooperatif, solidaritas, dan semangat kemasyarakatan. Semua unsur akhlak kewarganegaraan itu diyakini akan berpengaruh dalam membentuk warga negara yang baik (*to be good citizenship*), sehingga akan memupuk kehidupan “*civic community*” atau “*civil society*” atau masyarakat madani untuk Indonesia sesuai dengan cita-cita bangsa yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Secara faktual justru terdapat paradox antara harapan yang ingin dicapai melalui pendidikan dengan kenyataan yang terjadi di dalam kehidupan siswa dimana banyak perilaku siswa sebagai warganegara yang tidak mencerminkan perilaku ia sebagai manusia terdidik diantaranya adalah kurangnya keterlibatan aktif warganegara, kurangnya praktek dalam memahami hubungan kesejajaran/egaliter, menurunnya sikap saling percaya dan toleran, kehidupan yang kurang kooperatif, tidak memiliki solidaritas, dan kurangnya semangat kemasyarakatan seperti contoh sikap individualistik yang dipraktikkan oleh generasi muda sekarang ini.

Pendidikan berkarakter dalam konteks pendidikan formal maupun dalam konsteks pendidikan masyarakat, salah satunya diupayakan melalui mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah. Contoh mengenai sikap peduli terhadap sesama dapat dilihat dalam kegiatan pembelajaran maupun kehidupan sehari-hari siswa itu sendiri. Apakah mereka belajar penuh toleran, menghargai pluralisme, mau bekerjasama, saling membantu, dan saling menghargai, tanggung jawab, dan aktif dalam berorganisasi. Contoh lainnya mengenai sikap peduli di lingkungan sekolah juga dapat dilihat dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka, mereka belajar penuh toleran, memiliki semangat gotong royong, bekerjasama, saling membantu, dan saling menghargai.

KAJIAN KONSEPTUAL DAN TEORITIS MODEL SERVICE LEARNING

Kaye (2010:8) mendefinisikan *service learning* sebagai berikut.

“Service learning can be defined as a research-based teaching method where guided or classroom learning is applied through action that addresses an authentic community need in a process that allows for youth initiative and provides structured time for reflection on the service experience and demonstration of acquired skills and knowledge. Service learning differs from other form of community service or volunteer work because the educations of student and young people is always at its core. Student actively participate in the process of understanding, integrating, and applying knowledge from various subject areas as they work to improve their communities.”

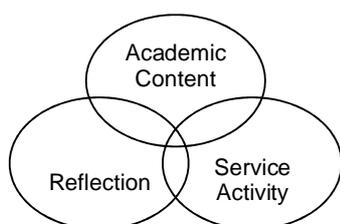
Dari penjelasan di atas mengenai belajar memberi pelayanan (*service learning*) dapat diartikan bahwa *service learning* dapat didefinisikan sebagai sebuah metode pengajaran berbasis riset di mana senjata ampuh belajar di kelas dilakukan melalui tindakan untuk mengatasi kebutuhan masyarakat pribumi dalam suatu proses yang memungkinkan bagi inisiatif para generasi muda dan struktur waktu untuk merefleksi pengalaman pelayanan dan menunjukkan pada pengalaman dan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari aksi praktek langsung. *Service learning* juga berbeda dengan *community service* dan kerja para sukarelawan karena *service learning* didasarkan pada pemahaman, integrasi, dan penerapan pengetahuan mereka didasarkan kepada isi dari materi yang dipelajari.

Selanjutnya Kaye (2010:9) memberikan penjelasan bahwa dengan *service learning* siswa akan memiliki kemampuan untuk: (a) *apply academic, social, and personal skill to improve the community*, (b) *make decisions that have real, not hypothetical, results*, (c) *growtas individuals, gain respect for peers, and increase civic participation*, (d) *experience success no matter what their ability level*, (e) *gain a deeper understanding of themselves, their community, and society*, (f) *develop as leaders who take initiative, solve problems, work as a team, and demonstrate their abilities while and through helping others*.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat diartikan bahwa *service learning* diharapkan dapat melatih siswa untuk: (a) mengaplikasikan keterampilan akademik, sosial, dan personalnya untuk mengembangkan komunitas, (b) membuat keputusan nyata bukan hipotesis maupun kesimpulan, (c) tumbuh sebagai individu, mendapatkan rasa hormat bagi rekan-rekan, dan meningkatkan partisipasinya, (d) memperoleh pengalaman yang sukses yang mungkin tidak sesuai dengan kemampuan mereka, (e) mendapatkan pemahaman yang lebih dalam diri mereka, komunitas mereka, dan masyarakat, (f) mengembangkan pemimpin yang mampu mengambil inisiatif, memecahkan masalah, bekerja sebagai sebuah tim, dan menunjukkan kemampuan membantu orang lain.

Service learning adalah kegiatan pembelajaran yang dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang akan dilayani, dan peserta didik terlibat secara aktif di dalam masyarakat untuk melaksanakan kegiatan pelayanan tersebut (Goldzweig, Levine, Schlundt, Bradley, Jones, Zoorob, dan Ekundayo, 2013). Selama pelaksanaan kegiatan pembelajaran, peserta didik menerapkan teori dan konsep yang dipelajari di dalam kelas ke dalam kegiatan praktik, kemudian melakukan refleksi terhadap pelayanan yang dilakukan dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan *service learning* telah mengalami perkembangan melalui 3 tahapan. Tahapan pertama adalah pelaksanaan *service learning* yang menekankan pada aktivitas sukarela untuk melayani (*voluntary service*), yang kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (*community service*), dan tahap *service learning*.

Giles, Chloe (2011) menjelaskan bahwa *Service learning is pedagogy that combines academic studies with community services, and the learning is enhanced by international and regular reflection*, yang secara sederhana digambarkan dalam gambar 1.



Gambar 1. Kegiatan *service learning* yang terdiri dari materi pelajaran, aktivitas layanan dan refleksi (Sumber: Giles 2011 dalam SLSI 2013, *Student Hand Book 201*)

Service learning dipandang sebagai pendekatan pendidikan yang memungkinkan peserta didik untuk berpikir, menilai, peduli atau melakukan sesuatu dan mempersiapkan untuk menghadapi tantangan sosial di masa depan. Sebagai upaya pembentukan *social responsibility*, peserta didik diharapkan mengetahui bahwa ada ketergantungan antara sesama, masyarakat dan lingkungan. Peserta didik diajak untuk berpikir terbuka dan secara aktif berusaha untuk memahami orang lain, norma-norma budaya, serta memanfaatkan pengetahuan untuk berinteraksi, berkomunikasi dan bekerja secara efektif dengan orang lain, bahkan ketika berada di luar lingkungan mereka. Peserta didik juga diajak untuk peka mengenali masalah dan merespon melalui tindakan seperti menjadi sukarelawan, mengikuti perkembangan aktivitas politik dan berpartisipasi dalam komunitas masyarakat.

Service learning dibagi menjadi empat tipe, yaitu: (1) *direct service learning*, dilaksanakan secara tatap muka antar orang dengan orang, proyek yang dilaksanakan berimplikasi dengan individu yang menerima bantuan langsung dari siswa, (2) *indirect service learning*, proyek dengan keuntungan untuk masyarakat, misalnya tentang lingkungan, sejarah kota, makanan dan pakaian, (3) *advocacy service learning*, memberikan layanan advokasi (konsultasi), dan (4) *research service learning*, minisurvei, mempelajari, mengevaluasi, menguji coba, mengumpulkan data, mewawancarai, dll, tujuannya untuk menemukan, mengkompilasi, atau melaporkan topic informasi tentang kepentingan umum.

The National Youth Leadership mencetuskan K-12 tentang standar kualitas praktis dalam pelaksanaan *service learning*, yaitu: kebermaknaan layanan (*meaningful service*), keterkaitan dengan kurikulum (*link to curriculum*), refleksi (*reflection*), keragaman (*diversity*), suara orang muda (*youth voice*), kemitraan (*partnership*), memantau kemajuan (*progress monitoring*), dan waktu dan intensitas (*duration and intensity*). Adapun proses *service learning* dapat dilakukan dengan investigasi, persiapan dan perencanaan, tindakan, refleksi, dan demonstrasi. Selain itu yang perlu diperhatikan adalah keterkaitan dengan masyarakat dan *assessment* (penilaian).

KAJIAN KONSEPTUAL DAN TEORITIS CIVIC ENGAGEMENT

Civic Engagement terdiri atas dua kata yakni *civic* dan *engagement*. Pada hakekatnya dalam berbagai referensi, *civic* dimaknai sebagai warganegara atau kewarganegaraan. Sedangkan *engagement* dimaknai sebagai “...tipically, engagement is understood as discipline-based work (a course assignment, a research project, an internship, fieldwork, a clinical placement and so on) that occur in non academic community (local, national, global) (Saltmarsh & Zlotkowski, 2011). Sementara itu, *American Psychologist Association* (2012) mendefinisikan *civic engagement* sebagai “Individual and collective actions designed to identify and address issues of public concern.”

Berdasarkan pengertian di atas, *civic engagement* diartikan sebagai tindakan kolektif dan individual yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan menunjukkan ketertarikan isu-isu umum. Merujuk pada pengertian tersebut, konsep *civic engagement* (selanjutnya disebut *CE*) mempunyai kaitan erat dengan pemerintahan demokratis (*democratic government*).

Dalam pandangan Dudley & Gitelson (2003) bahwa “political knowledge is a necessary precondition to civic engagement, but information per se is unlike to be a sufficient precondition to civic engagement”. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa terdapat prakondisi untuk mewujudkan *civic engagement* yakni pengetahuan politik dan jauh lebih penting lagi adalah berkenaan dengan informasi. Jadi, sebenarnya, untuk mengembangkan *civic engagement* maka diperlukan syarat penting yakni berkenaan dengan informasi dan pengetahuan politik. Oleh karena pengetahuan politik merupakan prakondisi untuk mengembangkan *civic engagement* maka menurut para pemikir politik mulai dari Jefferson sampai Dewey berasumsi bahwa pendidikan yang lebih baik merupakan solusi.

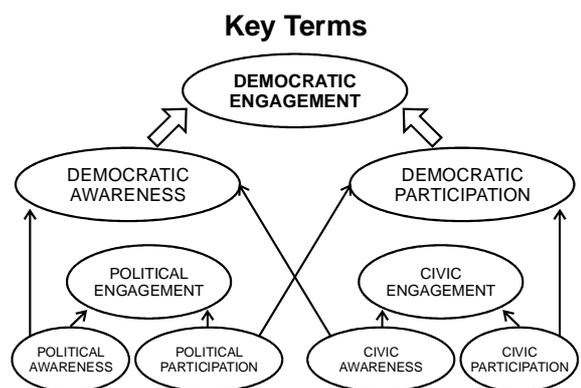
Lebih lanjut Dudley & Gitelson (2003) mengatakan “furthermore, the long-standing empirical observation that years of formal education are highly correlated with political knowledge seems to support this solution. Pendapat di atas, secara eksplisit menegaskan bahwa peranan pendidikan dalam mengembangkan *civic engagement* sangat penting dan merupakan solusi terbaik sebagaimana ungkapkan para

pemikir politik, seperti Jefferson dan Dewey. Jika dimaknai lebih luas, maka sesungguhnya konsep *civic engagement* tersebut terkait erat dengan warganegara sebagai insan politik atau sebagai makhluk yang senantiasa bermasyarakat atau berkawan dengan menggunakan berbagai pengaruh yang dimiliki terhadap warga yang lain.

Civic engagement sering disebut dengan istilah *civic participation*, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan tindakan warga negara baik individu maupun bersama-sama untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan pemerintahan dan berbagai kegiatan dalam lingkungan masyarakat. The New York Time (2013) menjelaskan bahwa *civic engagement* adalah mengerjakan sesuatu untuk membuat sesuatu yang berbeda dalam hidup warga negara bagi suatu komunitas dan mengembangkan kombinasi pengetahuan, keterampilan, nilai, dan motivasi untuk membuat sesuatu yang berbeda.

Menurut Keeter (2002) terdapat 19 indikator *civic engagement* yang dibagi dalam tiga indikator besar, yaitu *civic indicator*, *electoral indicators*, dan *indicator of political voice*. Civic indikator meliputi: (1) pemecahan masalah masyarakat, (2) relawan untuk organisasi non pemilu, (3) aktif dalam keanggotaan organisasi, (4) berpartisipasi dalam pengumpulan dana lari jalan atau bersepeda, (5) pengumpulan dana lain untuk amal. Electoral indicator meliputi: (1) voting pada umumnya, (2) membujuk yang lainnya, (3) menampilkan stiker, gambar, atau symbol, (4) berkontribusi terhadap kampanye, (5) relawan untuk kandidat atau organisasi politik. Indicators of political voice meliputi: (1) menghubungi pejabat, (2) menghubungi media cetak, (3) menghubungi siaran media, (4) protes, (5) petisi melalui email, (6) petisi tertulis, (7) memboikot, (8) menggambar.

White (2012) memberikan gambaran pentingnya *civic engagement* dalam membangun keterlibatan demokrasi adalah seperti dijelaskan pada gambar di bawah ini :



Dari kerangka konseptual yang dijelaskan dalam skema gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa *civic engagement* akan dibentuk dari adanya kesadaran warganegara (*civic awareness*) dan partisipasi warga negara (*civic participation*). Keterlibatan warga negara (*civic engagement*) adalah didasari oleh kesadaran yang bersifat inisiatif dan tulus tanpa paksaan dari orang lain. Sehingga dalam praktek melibatkan diri semuanya akan berdasar pada dorongan dari dalam individu itu sendiri untuk melibatkan dirinya dalam pemecahan masalah yang ada di lingkungan komunitasnya.

KETERKAITAN MODEL *SERVICE LEARNING*, *CIVIC ENGAGEMENT* DALAM PKN SEBAGAI UPAYA MEMPERKUAT KARAKTER WARGA NEGARA

Konsep dasar pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan karakter dimulai dari bagaimana pendidikan nilai bisa diterapkan. Mengenai pendidikan nilai, Hermann (dalam Winataputra & Budimansyah:2007) menyebutkan "...*value is neither taught nor cought, it is learned*", yang artinya bahwa substansi nilai tidaklah semata mata ditangkap dan diajarkan tetapi lebih jauh, nilai dicerna dalam arti ditangkap, diinternalisasi, dan dibakukan sebagai bagian yang melekat dalam kualitas pribadi seseorang melalui proses belajar. Makna pernyataan tersebut mengandung arti bahwa proses belajar tidaklah terjadi dalam ruang bebas-budaya tetapi dalam masyarakat yang syarat-budaya karena kita hidup dalam kehidupan masyarakat yang berkebudayaan. Oleh karena itu memang betul bahwa proses pendidikan pada dasarnya merupakan proses pembudayaan atau enkulturasi untuk menghasilkan manusia yang berkeadaban, termasuk di dalamnya yang berbudaya. Karakter adalah watak, tabiat, ahlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai nilai kebajikan (*virtues*) yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pendidikan kewarganegaraan seharusnya dijadikan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral dan karakter siswa yang diwujudkan dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Perilaku tersebut diwujudkan sebagai cerminan warga negara Indonesia yang cerdas,

terampil, dan berkarakter sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam mewujudkan pembentukan warga negara yang berkarakter tersebut, maka PKN sebagai suatu program pembelajaran telah dilakukan melalui *pedagogical development*, *sosio-cultural development*, dan *political intervention*. Dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah, kualitas pembelajaran PKN harus sesuai dapat mengembangkan *civic knowledge*, *civic values*, dan *civic skill*.

Civic knowledge (pengetahuan kewarganegaraan), mencakup bidang politik, hukum, dan moral. Materi pengetahuan kewarganegaraan terdiri dari pengetahuan tentang prinsip-prinsip dan proses demokrasi, lembaga pemerintahan dan non pemerintahan, identitas nasional, pemerintahan berdasarkan hukum (*rule of law*) dan peradilan yang bebas dan tidak memihak, konstitusi, sejarah nasional, hak dan kewajiban warga negara, hak asasi manusia, hak sipil dan hak politik.

Civics Values (nilai-nilai kewarganegaraan), terdiri dari percaya diri, komitmen, penguasaan atas nilai religius, norma dan moral luhur, nilai keadilan, demokratis, toleransi, kebebasan individual, kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berkumpul, dan perlindungan terhadap minoritas.

Civics skill (keterampilan warga negara), mencakup keterampilan partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, misalnya berperan serta aktif mewujudkan masyarakat madani (*civil society*), keterampilan mempengaruhi dan monitoring jalannya pemerintahan dan proses pengambilan keputusan politik, keterampilan memecahkan masalah sosial, keterampilan mengadakan koalisi, kerjasama, dan mengelola konflik.

Ketiga kompetensi yang harus dicapai melalui PKN seperti tersebut di atas, tentunya memerlukan upaya komprehensif dalam pencapaiannya. Selama ini pembelajaran PKN dalam prakteknya banyak mengarahkan siswa hanya pada aspek *civic knowledge* saja, sehingga upaya pembentukan karakter siswa sebagai warga negara kurang optimal. Padahal pendidikan kewarganegaraan seyogyanya bukan hanya sebagai proses pendidikan berpikir tetapi juga pendidikan nilai dan watak serta perilaku karena pendidikan nilai, watak serta perilaku sangat menunjang dalam membentuk karakter bangsa. Dalam mencapai tujuan pendidikan watak dan

perilaku tersebut diperlukan upaya pembiasaan melalui internalisasi dan aplikasi dari *civic knowledge*, *civic values* maupun *civic skill*. Siswa dituntut untuk belajar tidak hanya dikelas tetapi dituntut untuk bisa menerapkan ketiga kompetensi yang diperolehnya melalui pengalaman nyata yang dipraktekkan dalam memecahkan berbagai permasalahan yang ada dilingkungannya. Ketiga kompetensi tersebut akan sinergis dapat dicapai apabila setiap individu sebagai warga negara sudah memiliki *civic engagement* yang tercermin dalam kehidupan komunitasnya.

Salah satu upaya untuk menginternalisasi nilai dan menerapkan kompetensi yang dimiliki siswa, model *service learning* dianggap sebagai model yang akan membantu siswa dalam memberi makna terhadap penguasaan kompetensi yang dimiliki siswa dalam proses belajarnya. Proses pembelajaran bukan berpusat pada guru tetapi harus mampu mengembangkan keterampilan dan pengetahuan personal peserta didik melalui pengalaman nyata dalam realitas sosial yang dalam keterlibatannya dalam memecahkan masalah-masalah sosial dalam komunitasnya. Proses pendidikan memerlukan suatu pengalaman sebagai sebuah instrument yang nyata dari siswa untuk bisa merubah tatanan nilai yang ada di dalam dirinya, dan bisa mengubah kebiasaan-kebiasaan jelek melalui stimulus pembiasaan lewat pengalamannya sendiri. Pengalaman akan terbentuk dari penerapan seluruh pengetahuan yang diperoleh secara kognitif, dengan realitas sosial yang membutuhkan upaya pemecahan masalah. Dengan model *service learning* siswa akan dibiasakan untuk merubah nilai-nilai yang tidak baik yang mungkin tumbuh sebagai bawaan alamiah itu sendiri maupun pembiasaan dari lingkungan sebelumnya, menjadi nilai-nilai yang baik yang merupakan kritik dalam upaya pemecahan masalah dari realitas sosial di sekitarnya. Dengan kurikulum yang dimodifikasi oleh guru melalui model *service learning* ini diharapkan akan tumbuh upaya pembentukan instrument pengalaman siswa yang memadukan pengetahuannya dengan upaya pemecahan

masalah pada realitas sosial yang dihadapinya dari lingkungan sekitar mereka.

SIMPULAN

Service learning adalah kegiatan pembelajaran yang dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang akan dilayani, dan peserta didik terlibat secara aktif di dalam masyarakat untuk melaksanakan kegiatan pelayanan tersebut. Selama pelaksanaan kegiatan pembelajaran, peserta didik menerapkan teori dan konsep yang dipelajari di dalam kelas ke dalam kegiatan praktik, kemudian melakukan refleksi terhadap pelayanan yang dilakukan dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan *service learning* telah mengalami perkembangan melalui 3 tahapan. Tahapan pertama adalah pelaksanaan *service learning* yang menekankan pada aktivitas sukarela untuk melayani (*voluntary service*), yang kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (*community service*), dan tahap *service learning*

Istilah *engagement* itu sangat luas karena berhubungan dengan aktivitas warganegara dalam berbagai tingkat baik lokal, nasional, dan global. Sudah barang tentu *civic engagement* tersebut harus diaktualisasikan dalam kehidupan nyata. Dengan kata lain, setiap warganegara dituntut untuk mampu mengaktualisasikan dimensi-dimensi *civic engagement* tersebut dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

PKn mempunyai tugas untuk mengembangkan *kompetensi civic knowledge*, *civic values*, dan *civic skill*. Tujuan pembelajaran PKn untuk membentuk masyarakat yang baik (*good citizen*), Ketiga kompetensi tersebut akan sinergis dapat dicapai apabila setiap individu sebagai warga negara sudah memiliki *civic engagement* yang tercermin dalam kehidupan komunitasnya. Model *service learning* dianggap sebagai model yang akan membantu siswa dalam memberi makna terhadap penguasaan kompetensi yang dimiliki siswa melalui belajar

DAFTAR RUJUKAN

Dudley & Gitelson. 2003. *Political participation and civic Engagement to Democratic Participation*.

www.wikipedia.org/wiki/civic_engagement(online)

Giles, Chloedalam Student Hand Book. 2013, "Office of Service- Learning Lingnan Uni-

- versity” 2013 *Student HandBook*’ Hong Kong. puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/share/.../18559Journal of Service Learning), Vol. 1, No. 1, December 2013, 44-52 ISSN 2338-7866
- Goldzweig, Irwin A, Robert S Levine, David Schlundt, Richard Bradley, dkk. 2012. *Improving Seat Belt Use among Teen Drivers:Funding From a Service Learning Approach*.
Journal Homepage: www.elsivier.com/locate/app (online)
- Kaye, Cathryn Berger. 2010. *The complete Guide to Service Learning: Proven, Practical Ways to Engage Students in Civic Responsibility, Academic Curriculum & Social action*. USA: Free Spirit Publishing
- Keeter, S, Cliff Zukin, Molly Andolina, Krista Jenkins. 2002. *The Civic and Political Health of the Nation: A Generational Portrait. (The center for information and research on civic learning and engagement*
www.wikipedia.org/wiki/civic_engagement(online)
- Saltmarsh & Zlotkowski. 2011. *Civic Engagement and Political Participation*.
www.wikipedia.org/wiki/civic_engagement (online)
- The New York Time, *The definition of Civic Engagement* . 2010. www.nytimes.com/ref/colle
- White, Charles. 2012. *Democratic Engagement*. Materi disampaikan pada pelatihan Civic Education November 2012. Jakarta: Dirjen Dikti
- Winataputra, Udin, & Budimansyah, D. 2007. *Civic Education. Konteks, bahan Ajar, landasan, Dan Kultur Kelas*. Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Sekolah PascaSarjana, UPI Bandung
- Winataputra, Udin. 2008. *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Perkembangan Civic/ Citizenship Education Di Dunia*. Bahan Ajar dalam Kuliah PerbandinganCivic. Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Sekolah Pasca Sarjana, UPI Bandung.